

駐印尼台北經濟貿易代表處
與
駐台北印尼經濟貿易代表處
度量衡合作瞭解備忘錄

**駐印尼台北經濟貿易代表處
與
駐台北印尼經濟貿易代表處
度量衡合作
瞭解備忘錄**

駐印尼台北經濟貿易代表處(TETO)與駐台北印尼經濟貿易代表處(IETO)以下共稱「雙方」，各稱「一方」。

鑒於雙方有致於共同提倡和強化平等及互惠精神之技術性合作，
依據雙方各別國家的現行相關法律與法規，
達成下列瞭解：

第 1 條：原則與目標

基於雙方共同之經濟利益，雙方決定本瞭解備忘錄將依下列原則及目標執行：

1. 促進雙方在度量衡領域之專家及資訊交流；
2. 重申雙方遵守國際組織所制定有關度量衡原則與規範；
3. 執行度量衡領域之合作項目與提案。

第 2 條：合作範疇

雙方同意在度量衡領域進行下列合作項目與提案：

1. 度量衡資訊交換：各自交換所發行之法律、法規及其他相關技術文件等資訊；
2. 度量衡法律及法規諮詢：就發展法規架構提供諮詢；
3. 量測標準比對：相互比對量測標準以評估其準確度與可追溯性；
4. 量測標準合作：
 - (1) 共同研究和設計新量測方法及程序；及
 - (2) 研究新原理及方法以改進原級標準。
5. 專家交流及訓練：為進行合作計畫、演講、考察訪問、研習、資訊交流及其他活動，雙方得派官方代表及專家互訪交流或短期停留。

第 3 條：執行機構

1. 駐印尼台北經濟貿易代表處：經濟部標準檢驗局；及
2. 駐台北印尼經濟貿易代表處：貿易部消費者保護與貿易遵循總司。

第 4 條：經費

1. 專家交流及訓練期間之國際旅費、當地交通及膳宿費用由派遣方負擔，其他因該專家交流及訓練所可能衍生之費用，包括個人旅行醫療及一般責任險等亦由派遣方自行負擔。
2. 依據本瞭解備忘錄舉辦各項活動所需之經費將依個案方式共同安排。

第 5 條：保密

雙方應確保本瞭解備忘錄架構下所獲取之文件及資訊之機密性。該等資訊只有在取得資訊提供方之書面同意下方能轉送第三者。

第 6 條：智慧財產權

1. 一方執行本瞭解備忘錄所產生之任何智慧財產應歸屬該方。
2. 本瞭解備忘錄之活動所產生之任何智慧財產權應共同持有，並受雙方另行簽署之協議管轄。

第 7 條：人員活動限制

任何從事有關本瞭解備忘錄活動之人員應尊重地主國家之政治獨立、主權和領土，且應避免任何活動與本瞭解備忘錄之原則與目標不一致。

第 8 條：不可抗力

1. 任一方若因不可抗力因素造成任何延遲或未能履行本瞭解備忘錄時，該方不構成違約或須負擔任何另一方所提之損害賠償。
2. 受不可抗力事件影響之一方應不遲延地通知另一方，且應告知另一方不可抗力事件之程度及預估將持續之時間；該義務履行之時間應據此延長。

第 9 條：爭端解決

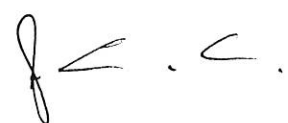
雙方同意應透過相互友善地討論和協商以最大努力解決彼此就本瞭解備忘錄所產生或與本瞭解備忘錄有關之爭端或歧見。該等協商應本於誠信。

第 10 條：聯繫窗口

任一方應指定一聯繫窗口，以執行與本瞭解備忘錄相關文件正常溝通。

第 11 條：生效、修正及終止

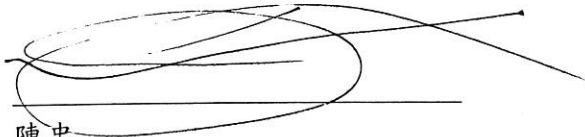
1. 本瞭解備忘錄應自簽署日生效，除任一方於終止日至少 6 個月前以書面通知另一方終止本瞭解備忘錄外，應持續有效。
2. 本瞭解備忘錄於任何時間之任何修正及/或修訂應經雙方書面同意，該修正及/或修訂應視為本瞭解備忘錄之一部分。
3. 除雙方另有決定外，本瞭解備忘錄之終止應不影響本瞭解備忘錄下有效活動或正在進行之活動直至活動完成。



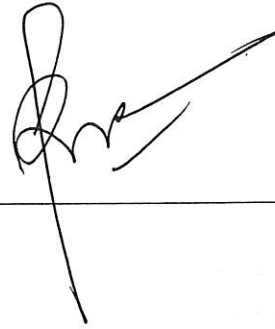
為此，雙方代表經各自充分授權，爰於本瞭解備忘錄簽字，以昭信守。
本瞭解備忘錄於 2018 年 8 月 24 日在臺灣臺北，以中文、印尼文及英文簽署一式
二份，三種文本同一作準。倘對本瞭解備忘錄解釋有歧異時，以英文本為準。

駐印尼台北經濟貿易代表處

駐台北印尼經濟貿易代表處



陳忠
代表



羅伯特
代表

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI TAIPEI, JAKARTA, INDONESIA
DENGAN
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI
TENTANG
KERJASAMA METROLOGI

Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei, Jakarta, Indonesia dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak".

MENIMBANG kepentingan bersama untuk menyelenggarakan dan membina kerjasama teknis dalam semangat persamaan dan saling menguntungkan;

MENINGAT hukum dan ketentuan yang berlaku di negara masing-masing;

MEMUTUSKAN kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Berpedoman kepada kepentingan ekonomi bersama, para Pihak setuju untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung pertukaran tenaga ahli dan pertukaran informasi di bidang metrologi antara Para Pihak;
2. Menegaskan kembali komitmen terhadap prinsip dan norma yang dikembangkan oleh Organisasi Metrologi Internasional;
3. Melaksanakan proyek dan prakarsa kerja sama di bidang Metrologi .

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Para Pihak setuju untuk melaksanakan proyek dan prakarsa kerjasama di bidang metrologi sebagai berikut:

1. Pertukaran informasi kemetrolgian: pertukaran hukum, peraturan, dan dokumen teknis relevan lainnya;
2. Konsultasi hukum dan peraturan metrologi: konsultasi dalam kerangka pengembangan peraturan;
3. Perbandingan standar ukuran: perbandingan standar ukuran untuk mengevaluasi keakurasian dan ketertelusurannya;
4. Kerjasama standar ukuran, mencakup:
 - (1) Melakukan penelitian bersama dan merancang metode dan prosedur pengukuran baru; dan
 - (2) Mengkaji prinsip dan metode baru untuk pengembangan standar ukuran.
5. Pertukaran dan Pelatihan tenaga ahli: pertukaran pegawai Pemerintah dan tenaga ahli (rencana jangka pendek), khususnya untuk mengerjakan proyek bersama, pendidikan, studi banding, pelatihan, pertukaran informasi dan hal-hal lainnya.

Pasal 3

INSTANSI PELAKSANA

1. Untuk Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei, Jakarta, Indonesia: *the Bureau of Standards Metrology and Inspection* (BSMI) Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan; dan
2. Untuk Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei: Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Indonesia.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB KEUANGAN

1. Selama periode pertukaran dan pelatihan tenaga ahli, biaya transportasi internasional/lokal dan biaya keperluan sehari-hari (konsumsi dan akomodasi)

ditanggung oleh Pihak pengirim. Masing-masing Pihak harus menanggung sendiri biaya yang dikeluarkan selama pertukaran dan pelatihan tenaga ahli, termasuk asuransi kesehatan dan asuransi umum.

2. Pembiayaan terhadap berbagai kegiatan sebagai konsekuensi dari Memorandum Saling Pengertian ini akan disepakati bersama berdasarkan kasus per kasus.

Pasal 5

KERAHASIAAN

Para Pihak harus menjamin kerahasiaan terkait dokumen dan informasi yang diterima dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini. Informasi ini hanya bisa diberikan pada Pihak ketiga setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak yang memberikan informasi.

Pasal 6

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Setiap kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, tetap menjadi milik Pihak tersebut.
2. Setiap hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan dalam Memorandum Saling Pengertian ini menjadi milik bersama, dan untuk pengaturan terpisah diputuskan antara Para Pihak.

Pasal 7

PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL

Siapapun yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan Memorandum Saling Pengertian harus menghormati independensi politik, kedaulatan dan teritorial Negara tuan rumah, dan harus menghindari kegiatan apapun yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 8

KONDISI DARURAT (*FORCE MAJEURE*)

1. Keterlambatan atau kegagalan apapun dari salah satu Pihak dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, bukan merupakan kelalaian dari Pihak tersebut atau yang dapat menimbulkan klaim ganti rugi apabila keterlambatan atau kegagalan kinerja tersebut disebabkan oleh kondisi darurat (*Force Majeure*).
2. Pihak yang terkena dampak *Force Majeure* harus memberitahu Pihak lain secepatnya (tanpa penundaan) dan menyampaikan Pihak lain sejauh mana dampak *Force Majeure* dan periode waktu pelaksanaan kegiatan harus diperpanjang.

Pasal 9

PENYELESAIAN SENGKETA

Para Pihak setuju bahwa mereka harus melakukan usaha terbaik untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perbedaan pendapat di antara mereka, yang timbul dari atau berhubungan dengan Memorandum Saling Pengertian ini, secara damai melalui diskusi dan konsultasi bersama. Konsultasi tersebut harus dilakukan dengan itikad baik.

Pasal 10

KONTAK PENGHUBUNG

Masing-masing Pihak harus menunjuk kontak penghubung, untuk melakukan komunikasi secara berkala dalam menjalankan Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 11

MULAI BERLAKU, AMANDEMEN DAN MASA BERAKHIR

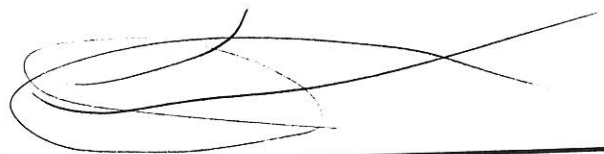
1. Memorandum Saling Pengertian ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku kecuali diakhiri melalui pemberitahuan

- tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum tanggal efektif berakhirnya Memorandum Saling Pengertian.
2. Kapanpun terjadi amandemen dan/atau revisi untuk Memorandum Saling Pengertian ini, harus disepakati bersama oleh Para Pihak secara tertulis. Amandemen dan/atau revisi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
 3. Berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan durasi dari setiap aktivitas yang sedang berlangsung di bawah Memorandum Saling Pengertian ini hingga penyelesaian kegiatan-kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak memutuskan sebaliknya.

DEMIKIANLAH, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (IETO) dan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (TETO), telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

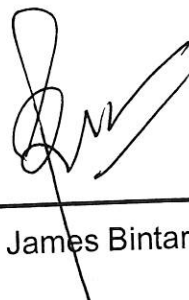
Ditandatangani dalam dua rangkap di Taipei, Taiwan pada 24 Agustus 2018 dalam Bahasa Mandarin, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang wajib berlaku.

**Untuk Kantor Dagang dan Ekonomi
Taipei, Jakarta, Indonesia**



John, C. Chen

**Untuk Kantor Dagang dan Ekonomi
Indonesia di Taipei**



Robert James Bintaryo

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE, JAKARTA, INDONESIA
AND
THE INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI
FOR
COOPERATION IN METROLOGY**

The Taipei Economic and Trade Office, Jakarta, Indonesia (TETO) and The Indonesian Economic and Trade Office to Taipei (IETO) hereinafter referred to collectively as the "Parties", and individually as a "Party".

CONSIDERING their common interest to promote and foster technical cooperation in spirit of equality and mutual benefit;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

HAVING REACHED the following understanding:

**Article 1
PRINCIPLES AND OBJECTIVES**

Being guided by their joint economic interest, the Parties agree to implement this Memorandum of Understanding (MOU) with the principles and objectives of :

1. Promoting the exchange of experts and information in the field of metrology between the Parties;
2. Reaffirming their commitment to the principles and norms developed by international organizations for metrology;
3. Implementing cooperation projects and initiatives in the fields of metrology.

**Article 2
SCOPE OF COOPERATION**

The Parties agree to implement the following cooperation projects and initiatives in the fields of metrology:

1. Exchange of metrological information: exchange of laws, regulations, and other relevant technical documents;
2. Consultation of laws and regulations on metrology: consultations on developing regulatory framework;
3. Measurement standards comparison: comparisons of measurement standards to evaluate their accuracy and traceability;
4. Measurement standards cooperation:
 - (1) Joint research work and devising of new measuring methods and procedures; and;
 - (2) Studies of new principles and methods to improve primary standards.
5. Expert exchange and training: exchange/short-term stay of government officials and experts, in particular for the implementation of joint project, lectures, informational visits, studies, information exchange and other events.

**Article 3
IMPLEMENTING AGENCY**

1. For TETO: the Bureau of Standards Metrology and Inspection (BSMI) of the Ministry of Economic Affairs; and
2. For IETO: Directorate General of Consumer Protection and Trade Compliance, Ministry of Trade.

**Article 4
FINANCIAL RESPONSIBILITIES**

1. During the period of expert exchange and training, the cost of international/local transportation and subsistence (food and accommodation) shall be borne by the sending Party. Each Party shall be responsible for its own cost incurred by the expert exchange and training, including health care and general liability insurance.
2. Financing of the various activities initiated under this MOU will be jointly agreed to on a case-by-case basis.

**Article 5
CONFIDENTIALITY**

The Parties shall ensure confidentiality concerning documents and information received within the framework of this MOU. This information can only be transferred to a third party after gaining the written consent of the Party that provided the information.

**Article 6
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

1. Any intellectual property brought by a Party for the implementation of this MOU shall remain the property of that Party.
2. Any intellectual property rights resulted from activities under this MOU shall be jointly owned and subject to separate arrangement concluded between the Parties.

**Article 7
LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES**

Any person engaged in activities related to this MOU shall respect political independence, sovereignty, and territorial of the host country, and shall avoid any activities inconsistent with the purpose and objectives of this MOU.

**Article 8
FORCE MAJEURE**

1. Any delay in or failure in the implementation of this MOU by either Party shall not constitute default by such Party or give rise to any claim for damages against it if such delay or failure of performance is caused by Force Majeure.
2. The Party affected by the Force Majeure event shall notify the other Party without delay and shall advise the other Party as to the extent and presumable duration of the Force Majeure event; and the time for the performance of that obligation shall be extended accordingly.

**Article 9
DISPUTE SETTLEMENT**

The Parties agree that they shall use their best endeavour to settle any dispute or difference of opinion between them, arising from or connected with this MOU, amicably through mutual discussions and consultations. Such consultations shall be conducted in good faith.

**Article 10
CONTACT POINTS**

Each Party shall designate a contact point for regular communication to implement this MOU.

**Article 11
ENTRY INTO FORCE, AMENDMENT AND TERMINATION**

1. This MOU shall enter into force on the date of its signing and will remain in force unless it is terminated through a written notice from one Party to the other Party at least 6 (six) months prior to the intended date of termination.
2. Any amendment and/or revision to this MOU at any time shall be mutually agreed upon by the Parties in writing. The amendment and/or revision shall form an integral part of this MOU.
3. The termination of this MOU shall not affect the validity and duration of any on-going activities made under this MOU until the completion of such activities unless the Parties decide otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this MOU.

Done in duplicate in Taipei, Taiwan on the 24th of August the year 2018 in Chinese, Indonesian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Taipei Economic and Trade
Office, Jakarta, Indonesia



John C. Chen
Representative

For the Indonesian Economic and
Trade Office to Taipei



Robert J. Bintaryo
Representative



